Pertanggungjawaban Direksi PT Pertamina Patra Niaga Atas Beban FInansial Penugasan Pemerintah Yang
Tidak Terkompensasi dalam Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak
Evalina Sitepu, Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2010.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Clark, Robert C. *Corporate Law*. Boston: Little, Brown and Company, 1986.

Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. Rev. ed. New Haven and London: Yale University Press, 1969.

Garner, Bryan A., ed. *Black's Law Dictionary*. 11th ed. St. Paul: Thomson Reuters, 2019.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Khairandy, Ridwan, *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013

Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 13. Jakarta: Kencana, 2017.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.

Nur Dewata, Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Cambridge: Harvard University Press, 1950.

Siregar, Bismar. *Badan Usaha Milik Negara dan Kewajiban Pelayanan Publik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1, cet. 17. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2017.

## B. Artikel Jurnal

Allen, William T. (1993). The Corporate Director's Fiduciary Duty of Care and the Business Judgment Rule. *Business Lawyer (ABA)*, Vol. 48, No. 4.

Azheri, Busyra & Upita Anggunsuri. (2020). The Implementation of Business Judgment Rule Principle in Managing the Company. *Nagari Law Review*, Vol. 03, No. 02.

Fikriya, Tasya Nailul. (2020). Tanggung Jawab Direksi pada Perseroan Terbatas Milik Badan Usaha Milik Negara. *Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 3.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
**Pertanggungjawaban Direksi PT Pertamina Patra Niaga Atas Beban FInansial Penugasan Pemerintah Yang Tidak Terkompensasi dalam Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak**
Evalina Sitepu, Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.
**Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/**

Hill, Jennifer G. (2020). Shifting Contours of Directors' Fiduciary Duties and Norms in Comparative Corporate Governance. *ECGI Working Paper Series in Law, Social Science Research Network*, No. 489.

Kennedy-Good, Stephen. (2022). The Business Judgment Rule (Part 2). *OBITER Nelson Mandela University Law Journal*, Vol. 27, No. 02.

OECD, *OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises*, 2015 Edition, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264244160-en

Permadi, Shafira Andiena Qoyyumi. (2023). Tanggung Jawab Komisaris Perusahaan Perseroan BUMN Ditinjau dari UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Cakrawala Repositori IMWI*, Vol. 6, No. 2

Riley, C. A. (1999). The Company Director's Duty of Care and Skill: The Case for an Onerous but Subjective Standard. *The Modern Law Review*, Vol. 62, No. 5.

Sinaga, Raja Darius Sutardjo. "Sengketa Pajak atas Penugasan Pemerintah pada Perusahaan BUMN (Studi Kasus Pertamina, Pos Indonesia dan Reasuransi Indonesia Utama)." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54, no. 3 (2024).

Siregar, Bismar. "Penugasan Pemerintah kepada BUMN dalam Perspektif Kewajiban Pelayanan Publik." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, No. 2 (2018).

Sutedi, Adrian. "Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia 11, no. 4 (2014).

## C. Thesis dan Disertasi

Ansari, Muhammad Insa. "Pengaturan *Public Service Obligation* Yang Tidak Tegas Pada BUMN." *Disertasi doktor*, Universitas Indonesia, 2021.

## D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Berita Republik Indonesia Tahun II Tahun 1946 Nomor 7).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Pertanggungjawaban Direksi PT Pertamina Patra Niaga Atas Beban FInansial Penugasan Pemerintah Yang
Tidak Terkompensasi dalam Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak**
Evalina Sitepu, Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.
**Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7142).

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM sebagaimana telah beberapa kali diubah (terakhir dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2021), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi BBM dan LPG (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1277).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1085).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi Atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dan Tarif Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 947).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016).

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Bensin dan Minyak Solar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020).

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 62.K/12/MEM/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022).

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Formula Harga Dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Pertanggungjawaban Direksi PT Pertamina Patra Niaga Atas Beban FInansial Penugasan Pemerintah Yang
Tidak Terkompensasi dalam Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak**
Evalina Sitepu, Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.
**Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/**

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Lembaran Lepas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2022).

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berupa Minyak Solar (Gas Oil).

Keputusan Menteri ESDM Nomor 439.K/2023 tentang Formula Harga Dasar JBT Minyak Solar (Lembaran Lepas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2023)

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 439.K/EK.01/MEM.E/2025 tentang Alokasi Biodiesel Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025).

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 842).

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penugasan Badan Usaha dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022).

Surat Keputusan BPH Migas Nomor 118/P3JBT/BPH MIGAS/ KOM /2022 Tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) C.Q. PT Pertamina Patra Niaga Dalam Penyediaan dan Pedistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027.

Surat Keputusan BPH Migas Nomor 119/P3JBT/BPH MIGAS/ KOM /2022 Tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) C.Q. PT Pertamina Patra Niaga Dalam Penyediaan dan Pedistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027.

## E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,15 Desember 2004.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat tentang Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah dan BBM, 26 Februari 2026

## F. Dokumen-Dokumen Resmi

PT Pertamina Patra Niaga. Laporan Keuangan PT Pertamina Patra Niaga Tahun 2021-2025.

PT Pertamina Patra Niaga. Laporan Manajemen Pertamina Patra Niaga terkait Monitoring Top Risk Tahun 2004, 2005, 2006, dan 2023.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Pertanggungjawaban Direksi PT Pertamina Patra Niaga Atas Beban FInansial Penugasan Pemerintah Yang
Tidak Terkompensasi dalam Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak**
Evalina Sitepu, Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.
**Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/**

## G. Internet

Hidayat, Rofiq. "Business Judgment Rule, Direksi Tak Dapat Dimintakan Pertanggungjawaban Sepanjang…" Hukumonline, 6 Agustus 2024. https://www.hukumonline.com/berita/a/business-judgment-rule--direksi-tak-dapat-dimintakan-pertanggungjawaban-sepanjang-lt66b36caeebd63/ (diakses 8 Mei 2026).

Hoed, Rahayu, dan Reagan Roy Teguh. "Public Service Obligation = Subsidy? A Case Study From BUMN." World Services Group, May 2020. https://www.worldservicesgroup.com/ (diakses 8 Mei 2026).

Hukumonline. "Implementasi Business Judgment Rule: Mengapa Direksi BUMN Rentan Dikriminalisasi?" Hukumonline, 8 Desember 2025. https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-business-judgment-rule--mengapa-direksi-bumn-rentan-dikriminalisasi-lt6937c652d0d68/ (diakses 8 Mei 2026).

Octavia, Shela dan Damarjati, Danu. "Hakim Mulyono Dissenting Opinion di Vonis Riva Siahaan dkk dalam Kasus Minyak" Kompas online, 26 Februari 2026 https://nasional.kompas.com/read/2026/02/26/19422931/hakim-mulyono-dissenting-opinion-di-vonis-riva-siahaan-dkk-dalam-kasus?page=all. (diakses 18 Juni 2025)

Tim Redaksi DDTCNews. "Pajak Penghasilan dalam Pelaksanaan Public Service Obligations (PSO)." DDTCNews, 27 Agustus 2024. https://news.ddtc.co.id/review/analisis/1805048/pajak-penghasilan-dalam-pelaksanaan-public-service-obligations-pso (diakses 8 Mei 2026).